

**Memahami Kebijakan Pembinaan Pedagang  
Kaki lima Surabaya**  
Kajian Terhadap PERDA Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003

Oleh :

**Basa Alim Tualeka**  
Alumni Program Doktor Ilmu Adminmistrasi  
Pascasarjana - Untag Surabaya

**ABSTRAK**

*Penelitian “memahami kebijakan pembinaan pedagang kaki lima Surabaya, kajian terhadap Perda Kota Surabaya no. 17 tahun 2003 menghasilkan kesimpulan bahwa a) PKL binaan Pemerintah Kota Surabaya memiliki karakter yang unik, disatu sisi mendapat bantuan pembinaan dari Pemerintah Kota Surabaya namun di sisi lain sebagai pihak yang melawan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengenai berbagai kebijakan yang menyentuh kepentingan PKL, namun secara umum karakter PKL binaan ini memiliki ketenangan di dalam berusaha sehingga menjadi mitra usaha Pemerintah Kota Surabaya, b) PKL binaan Pemerintah Kota Surabaya telah meningkat kesejahteraannya baik finansial maupun sosial, c) Pemerintah Kota Surabaya telah merealisasikan berbagai usaha pembinaan PKL sehingga tercipta suatu keadaan kota Surabaya yang bersih, tertib, indah dan aman. Penelitian ini dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan pemkot Surabaya ini menggunakan penelitian kualitatif dengan membuka kemungkinan terhadap berbagai bahan informasi dari semua sumber.*

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pembinaan, Realisasi Pembinaan.

**PENDAHULUAN**

Selama ini kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia menitikberatkan pada GNP (*Gross National Product*) dan GDP (*Gross Domestic Product*). Namun, dalam pelaksanaannya tidak dibarengi dengan pemerataan hasil-hasil ekonomi sehingga pada akhirnya mengakibatkan berbagai ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, mempunyai berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan kota Surabaya ialah masalah penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL). Para PKL ini adalah warga kota yang pada umumnya golongan ekonomi lemah serta pendidikan dan ketrampilannya rendah atau sangat terbatas, mereka menganggap bahwa pekerjaan ini yang paling cocok untuk berjuang mempertahankan hidup di kota. Sektor industri yang diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi ternyata tidak bisa menyerap seluruh tenaga kerja yang semakin hari

semakin bertambah, oleh karena itu kesenjangan antara jumlah penduduk dengan kesempatan kerja semakin bertambah, maka sektor informasi seperti usaha PKL menjadi alternatif utama dan akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk perkotaan.

PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak atau benda yang semacamnya sehingga memudahkan mereka berpindah-pindah. Istilah ini sering ditafsirkan dengan jumlah kaki pedagang ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya me-

nyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Setelah Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Kalau dahulu sebutannya adalah pedagang emperan jalan, lama-lama berubah menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika mau merunut sejarah, mestinya sebutannya adalah pedagang lima kaki.

Sebagaimana problem sektor informal pada umumnya, PKL juga meredam sejumlah permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan ini timbul disamping sebagai akibat dari kebutuhan dan tuntutan kemudahan masyarakat pengguna jasa atau usaha, dan datang dari keterpaksaan subyek PKL. Titik pangkal permasalahan PKL adalah adanya ketidaksamaan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan PKL dan Pemerintah serta sebagian kepentingan umum.

Ketika PKL belum menjamur seperti sekarang ini, mungkin eksistensi PKL masih belum menjadi masalah yang serius. Tetapi dengan pertimbangan kota yang kemudian diikuti dengan tumbuh suburnya usaha PKL, menjadi masalah dan memerlukan perhatian serius dari semua kalangan. Karena di dalam PKL itu mengandung permasalahan yang juga memiliki potensi positif ekonomi masyarakat, maka permasalahan yang hendak dicarikan solusi akan berpangkal dari dua kutub yang sepintas nampaknya antagonis, yaitu permasalahan dan aspek pengembangan ekonomi, aspek ketertiban umum dan aspek kepentingan Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan kondisi semacam ini Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk mengadakan pembenahan meliputi penataan, pembinaan, dan mengendalikan usaha PKL menjadi maju, kuat dan bisa menempati usaha-usaha yang resmi.

Secara teoritik Grindle (1980) mengatakan aktivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel penting yaitu; a) tujuan kebijakan, b) aksi program dan desain proyek, c) konten kebijakan, d) kontek implementasi, dan e) hasil-hasilnya. Berdasarkan pemikiran teoritik Grindle dan persoalan PKL di Surabaya, maka pertanyaan penelitiannya ada-

lah Bagaimana karakteristik dan kondisi sosial ekonomi PKL Binaan Pemerintah Kota Surabaya? Bagaimana kebijakan pengelolaan PKL Binaan Pemerintah Kota Surabaya? Bagaimana realisasi pembinaan Pemerintah Kota Surabaya terhadap PKL Binaan? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan dibahas di dalam tulisan ini.

### A. Kerangka Teori

Pada sub bab ini dikonfirmasi sejumlah teori dan pendapat teoritik yang dikembangkan di dalam analisis untuk membangun kerangka pemikiran, juga sebagai landasan dalam membangun asumsi, analisis, dan kajian dalam penelitian ini. Sejumlah teori dan pendapat tersebut terutama yang berkaitan dengan teori pembangunan (*grand theory*), teori kebijakan publik (*middle theory*), dan teori implementasi kebijakan (*application theory*); yang selengkapnya disajikan dalam dalam bagian berikut.

### B. Prosedur Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007: 6).

Jenis penelitian kualitatif dipandang lebih relevan untuk meneliti implementasi kebijakan pengelolaan PKL, karena penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif biasanya dipergunakan dalam penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan social atau hubungan kekerabatan yang tumbuh secara natural dalam masyarakat. Beberapa data dapat diukur mela-

lui data sensus yang terdiri dari data kuantitatif, akan tetapi analisisnya tetap menggunakan analisis data kualitatif (Strauss & Corbin : 1997).

Ada beberapa istilah untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistic atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif kedalam, etnometodologi, *the Chicago School*, fenomenologis, studi kasus, interpretative, ekologis, dan deskriptif (Bogdan dan Biklen , 1982: 3). Creswall (2007:53-81) menyatakan bahwa terdapat lima pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologi, penelitian *grounded theory*, penelitian etnografi, dan penelitian studi kasus.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan naratif dengan mengandalkan observasi, wawancara dan bahan dokumenter. Naratif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif.

### C. Karakteristik dan Kondisi Sosial-Ekonomi PKL Binaan Pemkot Surabaya

Dari hasil penelitian ini diketahui pula bahwa para PKL tidak sendirian dalam menjalankan usahanya, mereka telah memiliki seorang asisten penjaga kios/lapak serta tiap kios/lapak rata-rata memiliki jam buka lebih dari 6 jam dalam sehari. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa beberapa PKL telah mampu untuk membayar upah bagi penjaga kios/lapak. Dengan kata lain berbisnis di sektor informal sebagai PKL mampu mengangkat kesejahteraan pekerkonomian mereka. Berdasarkan hasil penelitian ini juga diketahui bahwa rata-rata pendapatan tiap bulan para PKL adalah antara Rp. 500.000-2.000.000, bahkan terdapat sebagian kecil PKL yang berpendapatan > Rp. 3.000.000 tiap bulannya. Dari pendapatan hasil berjualan tersebut, ternyata dapat mencukupi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan PKL.

Mayoritas para PKL telah memiliki rumah tinggal meskipun masih dalam status kontrak

atau kost, dan beberapa bahkan ada yang berstatus rumah pribadi. Selain rumah, hasil berjualan sebagai PKL dapat pula mendukung kesejahteraan PKL yakni dapat menyekolahkan putra-putrinya hingga ke jenjang lanjut, atau dapat memenuhi kebutuhan akan transportasi seperti mobil atau sepeda motor.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pula bahwasannya PKL telah berhasil menyekolahkan putra-putri mereka meskipun tidak sampai pada jenjang perguruan tinggi, namun dominan mereka dapat menyekolahkan hingga tingkat SMA dan bahkan sebagian kecil yang dapat menyekolahkan hingga perguruan tinggi dan lulus perguruan tinggi. Selain itu untuk kebutuhan operasional transportasi PKL rata-rata telah memiliki kendaraan pribadi berupa sepeda motor meskipun hanya berjumlah satu unit namun terdapat pula PKL yang memiliki sepeda motor lebih dari 1 unit, dan bahkan ada sebagian kecil PKL yang memiliki mobil baik berjumlah 1 unit maupun lebih dari 1 unit.

Kegiatan berdagang sebagai PKL yang terbina secara khusus oleh Pemkot Surabaya ternyata dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan PKL, dan dari segi sosial mereka dapat dikatakan PKL resmi karena mendapat supervisi langsung dari Pemkot serta pembinaan-pembinaan secara berkala dan terstruktur sehingga keberadaannya di masyarakat tidak mengganggu kondisi lingkungan sekitarnya justru keberadaan mereka dapat menambah warna baru bagi masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik berupa peningkatan kesejahteraan PKL ini memberi implikasi secara teoritik, yaitu mendukung teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh 3 (tiga) variabel, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan (*nonstatutory variables affecting implementations*) yang dimaksud adalah berupa dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang

bersifat dis-insentif kurang mendapat dukungan publik.

Tetapi keberhasilan implementasi kebijakan publik yang berupa peningkatan kesejahteraan PKL ini belum dapat dinyatakan berhasil sepenuhnya. Karena PKL yang berpendapatan diatas tiga juta perbulan itu baru sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar masih berpendapatan antara lima ratus ribu sampai dengan dua juta per bulan. Selain itu juga masih banyak PKL yang hanya memiliki sepeda motor, meskipun ada beberapa yang memiliki mobil. Meskipun rata-rata PKL memiliki seorang asisten atau pembantu, namun hanya sebagian kecil saja yang memiliki lapak/kios lebih dari satu. Sebagian besar PKL sudah memiliki rumah tinggal, namun baru sebagian kecil saja yang berstatus rumah pribadi, sedangkan sebagian besar yang lainnya masih berstatus kontrak atau kost.

Sebagian besar PKL sudah mampu menyekolahkan putra-putrinya sampai dengan jenjang setingkat SMA, namun baru sebagian kecil saja yang mampu menyekolahkan putranya sampai dengan perguruan tinggi. Namun secara umum kegiatan berdagang sebagai PKL yang dibina secara khusus oleh Pemkot Surabaya ternyata dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan PKL.

#### **D. Kebijakan Pengelolaan PKL Binaan Pemkot Surabaya**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam manajemen kebijakan terhadap PKL Binaan sudah melalui mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Dengan demikian temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritik yaitu mendukung teori yang dikemukakan oleh Terry (Manulang: 2001) yang menyatakan bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan control.

Meskipun perencanaan dalam rangka pengelolaan PKL Binaan sudah dibuat oleh Pemkot Surabaya, misalnya perencanaan tentang peningkatan *softskill* dan *hardskill* dalam berjualan makanan yang sehat dan higien yang berupa pembinaan BINTEK, namun ada satu

perencanaan yang tidak dibuat oleh Pemkot Surabaya, padahal justru hal itu menjadi kebutuhan para PKL, yaitu kebutuhan tentang dana usaha atau modal usaha. Dalam hal perencanaan, Dinas Koperasi dan UMKM tidak membuat perencanaan dana usaha.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa manajemen kebijakan pengelolaan PKL binaan saat ini sudah mulai tertata dengan baik. Dengan demikian temuan penelitian ini relevan dan mendukung teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas *content of policy*, yaitu pada *program implementer* (pelaksana program). Implementasi kebijakan publik akan berhasil jika didukung dengan pelaksana kebijakan yang sudah tertata dengan baik.

Meskipun secara umum pelaksana kebijakan sudah tertata dengan baik, namun masih ditemukan adanya kekuarangan. Kekurangan tersebut misalnya ketidak mampuan Dinas Koperasi dan UMKM dalam memilih sendiri PKL-PKL mana saja yang akan menempati sentra-sentra jika tidak dibantu oleh kecamatan setempat dimana sentra berada. Semestinya Dinas Koperasi dan UMKM sebagai kepanjangan tangan Pemkot Surabaya yang khusus membidangi pembinaan PKL, harus mampu memilih sendiri PKL yang akan menempati sentra tanpa harus minta bantuan pihak atau unit lain.

Selain itu, dapat dinyatakan bahwa karena manajemen kebijakan pengelolaan PKL Binaan sudah mengadopsi fungsi-fungsi manajemen, berarti pelaksanaan kebijakan tersebut sudah memiliki dukungan teoritis. Dengan hasil penelitian ini relevan dan mendukung teori yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan salah satunya oleh variabel, yaitu karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), yaitu seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena

sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

Perencanaan ini diawali dengan memastikan dimana lokasi PKL yang ber-KTP Surabaya, diteruskan dengan: 1) perencanaan tentang daftar sentra yang akan dibangun di suatu lokasi tertentu, 2) perencanaan tentang bentuk-bentuk pembinaan di masing-masing sentra, dan 3) perencanaan tentang pembenahan sentra-sentra PKL yang masih belum sempurna.

Temuan penelitian ini juga relevan dan mendukung teori yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh 3 (tiga) variabel, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan (*nonstatutory variables affecting implementations*) yang dimaksud adalah berupa tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat atau implementor. Aparat pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasi prioritas tersebut.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya tidak melakukan perencanaan tentang jenis bahan yang dijual, proses pembuatan, dan dana usaha. Dengan demikian temuan penelitian ini tidak relevan atau tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan salah satunya oleh variabel lingkungan kebijakan (*nonstatutory variables affecting implementations*) yang dimaksud adalah berupa tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat atau implementor. Aparat pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasi prioritas tersebut.

Penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Surabaya mengacu kepada Perda nomor 17 tahun 2003. Pasal 3 menyatakan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan dan mengatur: 1) waktu kegiatan usaha PKL, 2) jumlah PKL pada setiap lokasi PKL, 3) jenis barang yang diperdagangkan, dan 4) alat peraga PKL.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya tidak melakukan perencanaan tentang jenis bahan yang dijual, proses pembuatan, dana usaha, dan jam buka setiap kios/lapak. Dengan demikian temuan penelitian ini tidak relevan atau tidak mendukung Perda nomor 17 tahun 2003, khususnya pasal 3.

Dinas Koperasi dan UMKM tidak melakukan perencanaan dalam pembagian waktu buka kios/lapak karena jumlah PKL yang menempati sentra belum melebihi daya tampung maksimalnya. Dinas Koperasi dan UMKM akan melakukan perencanaan dalam pembagian waktu buka kios/lapak jika jumlah PKL yang menempati sentra sudah melebihi daya tampung maksimalnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membagi kepentingan bersama agar seluruh PKL Binaan mendapatkan kesempatan berjualan dan kesempatan menempati sentra PKL tersebut. Berdasarkan data di Dinas Koperasi dan UMKM jumlah PKL yang menempati tiap sentra masih di bawah daya tampung maksimalnya, sehingga saat ini Dinas Koperasi dan UMKM belum melaksanakan perencanaan untuk pembagian waktu buka kios/lapak.

#### **E. Realisasi Pembinaan PKL Binaan Pemkot Surabaya**

PKL-PKL Binaan diwajibkan atas mereka pasal-pasal yang harus mereka penuhi yang telah tertuang seluruhnya dalam Perda No. 17 Tahun 2003 dan perda No. 17 Tahun 2004. Pasal-pasal yang dipenuhi oleh para PKL Binaan tertuang dalam wujud kewajiban-kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap PKL-PKL di tiap sentra setelah menerima hak atas mereka yang selayaknya.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwasannya Dinas Koperasi dan UMKM sebagai dinas dibawah naungan Pemkot Surabaya yang diberikan kewenangan dalam mengintervensi dan memberikan pembinaan membebaskan seluruh PKL-PKL Binaannya di tiap sentra PKL dari pungutan retribusi (uang legas) baik dalam bulanan maupun tahunan. Selain dibebaskan dari pungutan retribusi (uang legas), PKL juga dibebaskan dari kewajiban mengurus surat perpanjangan

izin berjualan di lokasi sentra tersebut. Meskipun Pemkot Surabaya membebaskan mereka dari kewajiban retribusi dan izin perpanjangan dalam berjualan, namun masih ada kewajiban-kewajiban lainnya yang harus mereka lakukan sebagai rasa ikut memiliki dan menjaga sentra PKL yang ditempati yaitu dengan melakukan kegiatan menjaga kebersihan/keindahan lingkungan di lokasi sentra PKL, menjaga fasilitas-fasilitas yang diberikan di dalam sentra PKL (TV, panggung, perlengkapan hiburan, serta rombongan bagi yang diberi fasilitas rombongan), maupun melaksanakan himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebagai bentuk intervensi dan pengontrolan kegiatan PKL di lapangan.

Meskipun ada kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, namun tidak ada sanksi jika PKL tidak melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan/keindahan dan menjaga fasilitas yang diberikan di dalam sentra PKL. Temuan penelitian ini memberi implikasi teoritik, yaitu tidak relevan atau tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Crosby (2002), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh adanya sanksi hukum. Orang dengan akan sangat terpaksa mengimplementasikan dan melaksanakan suatu kebijakan karena ia takut terkena sanksi hukuman misalnya denda, kurungan dan hukuman semacamnya. Selain itu, orang atau sekelompok orang seringkali mematuhi dan melaksanakan kebijakan karena ia tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar aturan hukum, sehingga dengan terpaksa ia melakukan isi kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat retribusi dalam bentuk lain yang harus dikeluarkan oleh setiap PKL di tiap sentra PKL. Bentuk retribusi lain tersebut adalah iuran sampah yang dibayarkan setiap hari dengan nominal antara Rp. 2.000 – 3.000. Iuran sampah ini wajib dilaksanakan demi memenuhi kewajiban utama yang dimandatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yakni untuk menjaga kebersihan dan keindahan lokasi sentra PKL.

Meskipun PKL masih dibebani kewajiban, yaitu berupa membayar iuran sampah setiap hari sebesar Rp.2.000 sampai dengan Rp.3.000,-, namun tidak ada sanksi yang diberikan kepada PKL jika mereka tidak mau membayarnya. Dengan demikian temuan penelitian ini tidak relevan dan tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Crosby (2002), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh adanya sanksi hukum. Orang dengan akan sangat terpaksa mengimplementasikan dan melaksanakan suatu kebijakan karena ia takut terkena sanksi hukuman misalnya denda, kurungan dan hukuman semacamnya. Selain itu, orang atau sekelompok orang seringkali mematuhi dan melaksanakan kebijakan karena ia tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar aturan hukum, sehingga dengan terpaksa ia melakukan isi kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi, bahwa program-program intervensi yang pernah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM antara lain: pembinaan tentang cara berjualan (cara memasak, penyajian, kesehatan dan kebersihan makanan, gizi, air bersih), dan keamanan maupun ketertiban. Dengan informasi tersebut menunjukkan bahwa program-program pembinaan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di lapangan, selain itu juga sebagai bukti dari keseriusan dan komitmen Pemkot dalam menata dan memberdayakan PKL-PKL di Kota Surabaya.

Temuan yang berupa adanya pembinaan tentang cara berjualan dan lain-lain sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan program yang bertujuan memberikan pengetahuan dan bersifat kognitif. Dengan demikian temuan penelitian ini memberi implikasi teoritik atau relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan salah satunya oleh variabel karakteristik masalah (*tractability of the problem*), yaitu cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Program yang bertujuan memberikan

pengetahuan atau bersifat kognitif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Meskipun Dinas Koperasi dan UMKM telah memberi pembinaan kepada PKL tentang cara berjualan, tentang bagaimana menjaga kebersihan dan keindahan, namun demikian dalam penelitian ini tidak ditemukan informasi apakah Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan evaluasi terhadap PKL. Evaluasi tersebut untuk mengetahui perubahan perilaku, apakah sudah ada perubahan perilaku yang signifikan positif tentang cara berjualan, menjaga kebersihan dan menjaga keamanan, atau belum setelah dilakukan pembinaan. Untuk itu, peneliti tidak memiliki alasan yang kuat untuk mendukung teori yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan salah satunya oleh variabel karakteristik masalah, yaitu cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kebanyakan para PKL di tiap sentra menyatakan keterjaminannya dalam berjualan setelah bergabung menjadi PKL Binaan dalam satu sentra PKL. Keterjaminan yang dimaksud adalah mereka merasa tidak akan diusik ketenangannya dalam berjualan berupa pengusuran, pemindahan, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Para PKL juga menyatakan sebelum menjadi PKL Binaan Pemkot yang tergabung dalam satu sentra, mereka masih memiliki rasa belum terjamin atau waswas dalam berdagang meskipun kebanyakan dari mereka belum pernah terkena pengusuran oleh SATPOL PP.

Temuan penelitian ini relevan dan mendukung teori yang dikemukakan dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Crosby (2002), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh adanya kepentingan pribadi. Seseorang atau kelompok orang sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu implementasi kebijakan, maka dengan senang hati mereka akan menerima, mendukung, dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemkot Surabaya dalam penataan dan pemberdayaan

PKL telah mengalokasikan dana tahunan untuk membangun tiap sentra-sentra PKL di wilayah di Kota Surabaya. Hal ini adalah bentuk jaminan lainnya yang diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada para PKL Binaannya di tiap sentra PKL. Bentuk komitmen tambahan tersebut adalah suatu cara untuk meyakinkan para PKL Binaannya bahwa dengan masuknya para PKL sebagai PKL Binaan Pemkot Surabaya, para PKL akan mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan ketika masih belum berstatus sebagai PKL Binaan. Anggaran yang disisihkan oleh Pemkot Surabaya tersebut adalah hasil musyawarah dan kesepakatan antara Pemkot Surabaya (Bappeko) yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan kecamatan setempat yang didalam wilayahnya terdapat paguyuban PKL. Dengan demikian dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL sudah didukung oleh ketersediaan anggaran.

Temuan penelitian ini relevan dan mendukung teori yang dikemukakan dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Crosby (2002), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh adanya ketersediaan anggaran. Kebijakan baru umumnya tidak membawa anggaran. Kebijakan biasanya bermula dengan proses reformasi, jarang memiliki banyak sumber daya. Membuat progres reformasi, jarang memiliki banyak sumber daya. Membuat progres berarti memerlukan banyak sumber daya. Membuat progres berarti memerlukan lobi anggaran baru identifikasi sumber daya yang ada untuk mendukung implementasi dan negosiasi untuk relokasi sumber daya.

PKL yang dibina oleh Pemkot Surabaya adalah PKL yang tergabung dalam PKL Binaan, padahal masih ada PKL lain diluar PKL Binaan. Ini artinya PKL yang dibina ada sebagian dari populasi yang ada di Kota Surabaya, atau yang dibina ini adalah tidak semua PKL yang ada di Kota Surabaya. Dengan demikian temuan penelitian ini member implikasi teoritik atau relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan salah satunya oleh variabel karakteristik

masalah (*tractability of the problem*), yaitu proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program sulit diimplementasikan apabila sasarannya semua populasi, dan sebuah program lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pemkot Surabaya telah memberikan jaminan-jaminan berupa: pembinaan, jaminan akan rasa nyaman dan aman dalam berjualan, serta jaminan fasilitas-fasilitas yang diberikan di tiap sentra. Namun ada satu jaminan yang tidak didapatkan oleh PKL, yakni jaminan modal usaha. Sampai saat ini Dinas Koprasi dan UMKM belum merencanakan adanya modal usaha yang akan diberikan kepada para PKL baik dalam bentuk hibah, pinjaman lunak, maupun dana simpan-pinjam.

Dengan demikian hasil penelitian ini tidak relevan dan tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Crosby (2002), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh adanya ketersediaan anggaran. Kebijakan baru umumnya tidak membawa anggaran. Kebijakan biasanya bermula dengan proses reformasi, jarang memiliki banyak sumber daya. Membuat progres reformasi, jarang memiliki banyak sumber daya. Membuat progres berarti memerlukan banyak sumber daya. Membuat progres berarti memerlukan lobi anggaran baru identifikasi sumber daya yang ada untuk mendukung implementasi dan negosiasi untuk relokasi sumber daya.

Hasil penelitian ini juga tidak relevan dan tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh *Content of policy*, yaitu *Resources Commiteed* (sumber-sumber daya yang digunakan). Implementasi kebijakan publik harus didukung oleh sumber-daya yang memadai agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya dalam penataan dan pemberdayaan PKL telah memberi peluang berpartisipasi atau melibatkan para PKL dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian hasil penelitian ini relevan

dan mendukung teori yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan salah satunya oleh variabel karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), yaitu kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

Sesuai dengan hasil penelitian ditemukan informasi bahwa pendidikan PKL Binaan rata-rata SD sampai dengan SMA dan daerah asal para PKL Binaan dominan dari Kota Surabaya, maka PKL Binaan memiliki karakteristik yang homogen. Hasil penelitian ini relevan dan mendukung teori yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan salah satunya oleh variabel karakteristik masalah (*tractability of the problem*), yaitu tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Program relatif mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya homogen. Apabila heterogen, maka implementasi program akan sulit, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran berbeda.

Sesuai dengan hasil penelitian ditemukan informasi bahwa pendidikan PKL Binaan rata-rata SD sampai dengan SMA, rata-rata sudah memiliki rumah, rata-rata sudah memiliki pegawai atau penjaga lapak/kios, rata-rata sudah bisa menyekolahkan anaknya, maka rata-rata PKL Binaan sudah memiliki tingkat kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi. Hasil penelitian ini relevan dan mendukung teori yang dikemukakan oleh Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan salah satunya oleh variabel lingkungan kebijakan (*nonstatutory variables affecting implementations*), yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat



kat yang masih tertutup dan tradisional. Kemajuan teknologi juga membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.

George C. Edward III (1989:148), menyatakan bahwa ada empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Sejalan dengan pendapat Edward III, Mazmanian dan Sabatier (1987:4) juga menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan meyangkut beberapa hal, sebagai berikut (1) disahkannya undang-undang dan diikuti oleh output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh agen-agen yang mengimplementasikannya; (2) ketaatan kelompok sasaran (*target group*) dengan kebijakan tersebut; (3) pengaruh nyata baik yang dikehendaki atau tidak dan output kebijakan; (4) pengaruh kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh agen pengambil kebijakan; dan (5) perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau kebijakan tersebut.

Dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III maupun Mazmanian dan Sabatier, nampak jelas bahwa dalam implementasi kebijakan belum ada komitmen yang kuat dari semua pihak baik

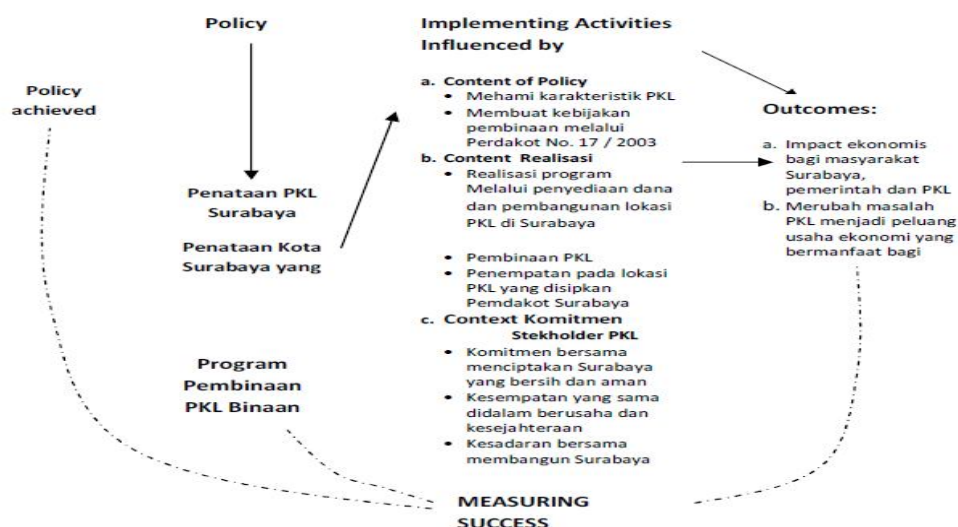
Pemkot Surabaya maupun PKL itu sendiri. Artinya, secara teoritik dan ilmiah, agar implementasi kebijakan itu berhasil harus ada variabel yang ke lima, yaitu komitmen. Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu, atau sebuah kontrak. Echols, John M. dan Shadily, Hassan (1976:130), menyatakan bahwa *commitment* adalah janji; memenuhi janji-janjinya; dan tanggung jawab.

Komitmen yang dimaksud dalam hal implementasi kebijakan ini adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi, menurut Luthans, Fred (2006:249) adalah 1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; 2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi; dan 3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Secara empiris, implementasi kebijakan di Indonesia tanpa ada variabel komitmen, kurang maksimum. Artinya, walaupun sudah ada variabel-variabel sebagaimana yang dikemukakan oleh para pakar implementasi kebijakan, misalnya George C. Edward III maupun Mazmanian dan Sabatier, untuk kasus di Indonesia jika tidak ditambah dengan variabel komitmen, maka implementasi kebijakan kurang berhasil dengan baik.

## F. Kritik Terhadap Grindle

**Gambar 6.1.:**  
**Implementasi Kebijakan PKL Binaan Pemkot Surabaya**  
**Kritik terhadap Marilee S. Grindle**



Kritik utama penelitian ini terhadap Grindle adalah pada komitmen pelaksana. Bahwa komitmen di dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan PKL binaan Pemkot Surabaya adalah sangat penting, baik komitmen bersama menciptakan Surabaya yang bersih dan aman, komitmen kesempatan yang sama dalam berusaha dan kesejahteraan, komitmen kesadaran bersama membangun Surabaya, serta komitmen penyediaan anggaran.

Di dalam masyarakat Indonesia, setiap pelaksanaan kebijakan maupun implementasi kebijakan, maka komitmen stakeholder adalah penting untuk kesuksesan melaksanakan kebijakan itu sendiri. Rupanya Grindle tidak melihat komitmen di dalam skema teorinya sebagai fenomena penting, karena itu penelitian ini memasukan komitmen di dalam skema teori Grindle sebagai kritik terhadap Grindle.

### Kesimpulan

1. Bahwa secara karakteristik dan kondisi PKL Binaan Pemkot Surabaya, pada umumnya setelah para PKL mendapat perhatian dan fasilitas dengan dibangun Sentra PKL Binaan, dan melalui pembinaan Pemkot Surabaya, hasilnya adalah peningkatan pendapatan ekonomi PKL Binaan, peningkatan pendapatan dari hasil penjualan selalu naik dan turun mengikuti irama pembeli atau konsumen, tapi pada prinsip, PKL sangat diuntungkan dengan adanya Sentra PKL Binaan, karena keamanan, kebersihan dan keindahan semakin tertata dan terjamin, sehingga kesejahteraan dalam segi finansial maupun sosial.
2. Dalam pengelolaan, penataan dan pembinaan PKL binaan Pemkot Surabaya, secara struktural dalam pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan manajemen kebijakan pengelolaan PKL melalui perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengontrolan pada tiap program yang dijalankan pada sentra PKL Binaannya. Pada tahap perencanaan, yang dilakukan adalah: a) Dinas Koperasi dan UKM bersama Camat setempat menentukan PKL yang ber KTP Sura-

baya; b) Mengajukan daftar nama sentra PKL yang akan dibangun; c) Pembinaan/pertemuan dengan PKL setidaknya 30 (tiga puluh) kali dalam setahun; d) Pembenahan sentra dengan penambahan tegel, pavingisasi, dan penambahan fasilitas lainnya. Pada tahap pengorganisasian, yang dilakukan adalah pembentukan struktur organisasi dan penanggung jawab di tiap-tiap sentra PKL. Namun demikian ada beberapa sentra PKL belum membentuk struktur organisasi. Pada tahap pelaksanaan, yang dilakukan adalah; 1) Pembinaan BINTEK yang bertujuan untuk meningkatkan *hardskill* dan *softskill* para PKL; 2) Pembinaan manajemen keuangan; 3) Pembinaan perkoperasian. Dalam rangka pembinaan PKL ini, Pemkot Surabaya juga mengangkat Asisten Junior yang bertugas memantau perkembangan PKL di setiap sentra. Pada tahap pengontrolan, yang dilakukan adalah Staf Dinas Koperasi dan UKM memberi teguran langsung atau SIDAK ke lokasi PKL.

3. Pemkot Surabaya telah melakukan pengelolaan, penataan dan pembinaan secara berkala dimana pembinaan tersebut memang diperlukan oleh para PKL, sekaligus para PKL dapat menikmati fasilitas sentra yang telah diberikan oleh Pemkot Surabaya tanpa dipungut biaya, birokrasi perpanjangan izin berjualan, maupun kewajiban-kewajiban pokok yang melekat pada status sebagai PKL Binaan. Namun, PKL masih memiliki kewajiban lain yang harus mereka lakukan yaitu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sentra PKL dan menjaga fasilitas yang diberikan oleh Pemkot Surabaya misalnya TV, rombongan, panggung, dan perlengkapan hiburan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ahrani, Yair. 1986. *Evolution and anagement of State Owned Enterprises*. Cambridge, M.A, Ballinger.
- Akharuzzaman, Mohammad dan Atsushi Deguchi, Atsushi. 2010. *Public Manage-*

- ment for Street Vendor Problems in Dhaka City, Bangladesh*. Japan: Proc. of International Conference on Environmental Aspects of Bangladesh (ICEAB10)
- Ansell, Chris dan Gash, Alison. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. November, 13, 2007.
- Bache, Ian dan Matthew Flinders (eds) 2005. *Multi Level Governance*. Oxford, USA.
- Bardach, E. 1977. *The Implementation Game. What Happenes After a Bill Becomes a Law*. Cambridge; MIT Press.
- Berry, Tanja. 2009. *Challenges and Coping Strategies of Female Street Vendors in the Informal Economy*". Pretoria: Gordon Institute of Business Science University of Pretoria.
- Bogdan, Robert C. & Biklen, Sari Knopp. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Borzel, Tinja A. 1998. *Organizing Babylon-on the Different Conceptions of Policy Networks*. *Public Administration*, Vol 76, pp.233-73
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Brinkerhoff, Derick. W. dan Benjamin L. Crosby. 2002. *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries*. Kumarian Press. Bloomfield.
- Bryce, Herrington J. 2005. *Player in the Public Policy Process: Nonprofits as Social Capital and Agents*. Palgrave, McMillan.
- Champion D. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Collebatch, H. 2002. *Policy*. Buckingham: Open University Press. London.
- Compston, Hugh. 2009. *Policy Network and Policy Change: Putting Theory to the Test*. Palgrave MacMillan, New York.
- Connick, Sarah, and Judith Innes. 2003. *Outcomes of Collaborative Water Policy Making: Applying Complexity Thinking to Evaluation*. *Journal of Enviromental Planning and Management*, Vol. 46 pp. 177-97.
- Creswell, W. John. 2005. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson Education International. New Jersey. USA.
- Creswall, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Chosing Among Five Approaches* (Second Edition). London: Sage Publication, Inc.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication, Inc. California. USA.
- De Bruijn, Hans A dan Hufen, Hans A.M. 1998. *The Traditional Approach to Policy Instrument, in B. Guy Peters dan Frans K.M. Van Nispen (eds). Public Policy Instruments; Evaluating the Tools of Public Administration*. Edwar Elgar, Cheltenham UK.
- DeLeon, Peter dan Linda deLeon. 2001. *A Democratic Approach to Policy Implementation*. Diakses pada 14 April 2011, pukul 18.02:36. [www.spea.indiana.edu/npmrc6/deleon.doc](http://www.spea.indiana.edu/npmrc6/deleon.doc).
- Denhart, Robert B. 1991. *Public Administration: An Action Orientation*. Brooks/Cole Pub. Co. California.
- Denscombe, Martyn. 2007. *The Good Research Giude: for Small-Scale Social Research Projects*. Third Edition. New York: Open University Press.
- Denzin, K. Norman & Lincoln, S. Yvonna. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication, Inc.
- Dye, R. Thomas. 2005. *Understanding Public Policy, 11<sup>th</sup> Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 1976. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Farazmand, Ali. 2004. *Sound Governance: Policy and Administrative innovations* Praeger, London.
- Farsari, Yianna; Richard Butier dan Poulicos Prastocos, 2007. Sustainable Tourism Policy for Mediterranean Destinations: issues and interrelationship” dalam International Journal of tourism Policy (IJTP) 1 (1), 58-78
- Fischer, Frank dan Forester, John (eds). 1993. *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Duke University Press, USA
- Grindle, Merilee S dan Thomas, John W. 1991. *Public Choices and Policy Change : The Political Economy of Reform in Developing Countries*. The John Hopkins University Press, Baltimore, USA.
- , 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey Princeton University Press.
- Hatta, Muhammad, 2002. *Kumpulan Pidato*, Jakarta.
- Hajer, Maarten A dan Wagenar (eds). 2003. *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society*. Cambridge, New York.
- Hill, Michel and Hupe, 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. Sage Publications, London, UK.
- Hogwood, Brian and Gunn, Lewis. 1993. *Why Perfect Implementation is Unattainabl*. Pp 238-247, dalam Michael Hill. 1993. *The Policy Prosess: A Reader*. Harvester-Wheatsheaf, New York.
- Howlett, Michael and Ramesh, M. 1995 *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford University Pres, New York
- Innes, Judith E. 2003. *Collaborative Policy Making: Governance Through Dialogue, dalam Maarten Hajer dan Hendrik Wage-*  
*naar. Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society*. Cambridge
- Islamy, M. Irfan, 2006a, *Comparative Public Policy*. Presentasi Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Administrasi . FIA Universitas Brawijaya, Malang
- Joachim, Jutta: Bob Reinalda dan Bertjan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation: Enforces, Managers, Authorities?* Routledge. New York.
- Klijn, Erik-Hans dan Joop F.M. Koppenjan P. 2000. *Public Management and Policy Network*. *Public Management*, Vol 2, No. 2, pp. 135-158.
- Knoepfel, Peter: Larrue, Corinne, Frederic and Hill, Michael. 2007. *Public Policy Analysis*. Policy Press, UK.
- Kolakowski L., 1968. *The Alienation of Reason: A History of Positivist Thought*. Garden City, NY: Doubleday.
- Leo, Mirjam Van Hest; Stijn Hoorens, Christian Van't Hof dan James P. Kahan 2003. *Cannabis Policy, Implementation and Outcome*. RAND Europe. California.
- Lester, James P. dan Joseph Stewart, Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Second Edition. Wadsworth. Australia.
- Lincoln, Yvonna S and Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage Publications.
- Longest, Beufort B. 2006. *Health Policy making in the United States*. Health Administration Press. Chicago and AUPHA Press, Washington.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi* (Edisi kesepuluh). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mahmudi. 2002. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Malo, Manasse dan Sri Trisnoningtias. 1989. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PAU-Ilmu-ilmu Sosial UI.

- Mark, G. 1993. *Structural and Policy and Multilevel Governance in the EC*. In A. Cafruny and G. Rosenthal (eds). *The State of European Community. Vol. 2: The Maastricht Debates and Beyond* Boulder, CO: Lynne Rienner and Harlow: Longman.
- Mazmanian, Daniel A. and Sabatier, Paul A., 1987. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company. Al Davis, University of California.
- , 1983. *Implementation and Public Policy*. Harper Collins, New York.
- McGann, James G. 2007. *Think Thank and Policy Advice in the US: Academic Advisor and Advocates*. Routledge, New York.
- McNabb, David E. 2002. *Research Methods in Public Administration and Non Profit Management and Qualitative Approachs*, M.E. Sharpe Inc., Bussines Park Drive, Armonk, New York.
- Mitnick, B.M. 1980, *The Political Economic of Regulation: Creating Designing and Removing Regulatory Forms*. New York, Columbia University Press.
- Nirathron, Narumol. 2006. *Fighting Poverty from The Street: A Survey of Street Food Vendors in Bangkok*. Thailand: Informal Economy, Poverty, and Employment.
- Nugroho, Riant. 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Gramedia Jakarta.
- , 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Gramedia Jakarta.
- Parson, Wayne. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Edgar Publishing, LTD and Landsdown Place, Cheltenham, UK, Lyme, US.
- O'Toole, Lawrence J.Jr. 1995. *Rational Choice and Policy Implementation: Implications for Interorganizational Network Management*. *American Review of Public Administration*, Vol. 25: 43-57.
- Pressman, J and Wildavsky, A. 1973. *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland; or why it's amazing that federal programs work at all. This being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation of ruined hopes*. Berkeley: University of California Press. Diakses dari <http://stor.com>.
- Pulzl, Helga dan Treib, Oliver. 2007. *Implementing Public Policy*. dalam *Handbook of Public Analysis: Theory, Politics and Methods*. CRC Press, Boca Raton.
- Reilly, Thom. 1998. *Communities in Conflict: Resolving Differences Through Collaborative Efforts in Environmental Planning and Human Service Delivery*, *Journal of Sociology and Welfare* Vol. 25, pp 115-42.
- Stanbury, W.T. and Fulton, Jane. 1984. *Suasion as a Governing Instrument in Alan Maslove (eds), How Ottawa Spends 1984: The New Agenda*. Toronto.
- Tualeka, B.A. 1995. *Implementasi Kebijakan-an Pembinaan Pedagang kaki Lima Di Kotamadya Surabaya*, Program Magister Untag, Surabaya.
- Van Meter, D., and Van Horn, C. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework" dalam *Administration and Society*, 6, 445-448
- Van Waarden, Frans. 1992. *Dimensions and Types of Policy Networks*. *European Journal of Political Research*, Vol. 21, No. 1, pp. 29-52.
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo